



PENETAPAN

Nomor 0777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dede Adrianto bin Paiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan H. Biru RT.002 RW. 002 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**

Yanti Susilowati binti Tukiran, umur 37, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Biru RT.002 RW. 002 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada 29 April 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan menurut agama Islam di hadapan amil desa yang bernama . Dengan Wali Nikah Ayah

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Yatman (Alm) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Gimman dan Wahyudi dengan maskawin berupa Emas 1 gram di bayar tunai;.

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 32 tahun;

3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Erlangga Maheswara Adrianto (L), Lahir 02 Juli 2016 ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah dan administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2012 diwilayah

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II
untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir
dipersidangan, dan oleh Hakim telah diberi nasehat seperlunya, namun para
Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan kemudian
dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
II, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah
bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I, yang
dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota
Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah
cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang
dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai
cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang
dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang yang telah bermeterai cukup
(dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3)
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang
dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aren Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5) ;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama AHMAD KHODORI yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.6) ;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor:919/AC/2009/PA.Tgrs, tertanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.7) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. IMAM SUDRAJAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kp. Jati RT.002 RW.003, Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 April 2012;
- Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tukiran;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Gimam dan Bapak Wahyudi;
- Saksi tahu maskawinnya berupa emas 1 gram sudah dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan,;
- Status Pemohon I adalah duda cerai dari YUNI EKA SUSANTI binti RM.FAIDIN dan Pemohon II adalah janda mati dari AHMAD KHODORI

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon II, dan Pemohon II setelah meninggalnya AHMAD KHODORI tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

- Pemohon I bercerai dengan YUNI EKA SUSANTI binti RM FAIDIN tahun 2009;
 - Suami Pemohon II yaitu AHMAD KHODORI meninggal dunia tahun 2009;
 - Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak, dan tidak pernah bercerai;
 - Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
 - Tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan pemohon;
 - Tidak ada isteri lain selain pemohon II, dan tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 - Untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. IYAN HENDRA KUSUMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jln. Inpres VI/33 RT.003 RW.007, Kelurahan Larangan Kecamatan Larangan Kota Tangerang.
- Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sebagai sepupu Pemohon I;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 April 2012;
 - Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
 - Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
 - Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tukiran;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Giman dan Bapak Wahyudi;
- Saksi tahu maskawinnya berupa emas 1 gram sudah dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan,;
- Status Pemohon I adalah duda cerai dari YUNI EKA SUSANTI binti RM.FAIDIN dan Pemohon II adalah janda mati dari AHMAD KHODORI suami Pemohon II, dan Pemohon II setelah meninggalnya AHMAD KHODORI tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Pemohon I bercerai dengan YUNI EKA SUSANTI binti RM FAIDIN tahun 2009;
- Suami Pemohon II yaitu AHMAD KHODORI meninggal dunia tahun 2009;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak, dan tidak pernah bercerai;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
- Tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan pemohon;
- Tidak ada isteri lain selain pemohon II, dan tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk selengkapannya mengenai jalannya pemeriksaan, ditunjuk

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1 P.2. P.3,dan P.4) atas nama para Pemohon, surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh kelurahan, bukti ini bukan atka autentik, namun dapat dijadikan bukti permulaan, atas bukti ini Majelis menilai tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Kematian atas nama AHMAD KHODORI yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, terbukti bahwa AHMAD KHODORI suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 2009, karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 29 April 2012, Pemohon II berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Akta Cerai Nomor:919/AC/2009/PA.Tgrs, tertanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan YUNI EKA SUSANTI binti RM. FAIDIN pada tanggal 10 Nopember 2009, karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 29 April 2012, Pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah pula menghadirkan bukti-bukti saksi, dan saksi-saksi yang diajukan

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5,P.6, dan P.7 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, saat menikah status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II gadis janda mati Wali nikah bernama Tukiran ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa emas 1 gram sudah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 29 April 2012, di

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dede Adrianto bin Paiman) dengan Pemohon II (Yanti Susilowati binti Tukiran) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta A. Mahfudin, S.Ag., M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota :

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Oki Haryadi, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.777/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)